

EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA LUBUK SIAM

KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Oleh :

Agus Mardi

NPM. 147310301

Negara Republik Indonesia memiliki adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)'' Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik. Undang-undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan Pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berkualitas dan bertanggung jawab sebagai unsur negara. Negara Republik Indonesia mempunyai cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa tersebut maka dilakukan pembangunan nasional disegala bidang kehidupan. Berdasarkan Fenomena-fenomena yang ada pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji suatu judul Penelitian Skripsi'' Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar''. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar serta untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, secara realita hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan Pengetahuan bagi anggota BPD Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan Informan tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini disebabkan BPD kurang mengetahui Tugas Dan Fungsi dari BPD itu sendiri serta kurang sinergi antara Pemerintahan Desa dan BPD, seharusnya menjadi rekan yang baik untuk kemajuan Desa, selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ialah faktor sumber daya manusia (SDM), Organisasi dan Manajemen BPD, Fasilitas Kerja Kurang memadai dan kurangnya bimbingan Teknis dari Daerah.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE
PERMUSYAWARATAN IN VILLAGE SIAM POWDER
KAMPAR DISTRICT OF HEART OF KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

By:

Agus Mardi

NPM. 147310301

The Republic of Indonesia has a Unitary State in the form of a Republic, as set forth in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 1 Paragraph (1) " The State of Indonesia is the Unitary State of the Republic. The 1945 Constitution requires a united and unified government, a good mentality, authoritative, qualified and responsible as an element of the state. The Republic of Indonesia has the ideals contained in the Preamble of the 1945 Constitution is to protect the entire nation and the entire blood of Indonesia and to advance the general welfare, in order to achieve the ideals of the nation, it is carried out national development in all spheres of life. Based on the phenomena that exist in this study the authors are interested to review a title Thesis Research " Evaluation Implementation Kewenangan Village Consultative Agency In Lubuk Siam Village Siak Hulu District Kampar Regency ". The purpose of this study is to determine the Implementation of Authority of Village Consultative Board in Lubuk Siam Village Siak Hulu Subdistrict Kampar Regency and to know Factors inhibiting the Implementation of Authority of Village Consultative Board In Lubuk Siam Village Siak Hulu Subdistrict Kampar Regency, in reality the results of this study can be used as materials input and Knowledge for members of BPD In Lubuk Siam Village Siak Hulu District Kampar District. Based on the results of the authors of the field, it can be concluded that the informant's response on the Evaluation of the Implementation of the Authority of the Village Consultative Board In Lubuk Siam Village, Siak Hulu Sub-district, Kampar Regency is not fully implemented yet. This is because BPD is less aware of the Duties and Functions of BPD itself and lack of synergy between the Village Government and BPD, should be a good partner for the progress of the Village, in addition to the inhibiting factors in the implementation of the Authority of Village Consultative Bodies In Lubuk Siam Village Siak Hulu District Kampar are human resource (HR) factor, Organization and Management of BPD, Inadequate Work Facility and lack of Technical Guidance from Region.

Keywords: Village Government, Village Deliberation Board and Authority of Village Consultative Board.